

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO KABUPATEN BERAU**

**Abdul Hakim  
Rosita Kumalasari**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effects of Investment and Government Expenditure toward Gross Regional Domestic Product of Berau Regency. The data used in this research are secondary data period 2010-2018 that obtained from BPKAD and the Central Statistics Agency (BPS) of Berau Regency also DPMPTSP East Kalimantan Province. The method used to analyze data is multiple linear regression using the SPSS program.*

*The results showed that simultaneously Investment and Government Expenditure has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product. Partially, Domestic Investment has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product, but Foreign Investment and Government Expenditure have positive and insignificant effects on Gross Regional Domestic Product.*

*Keyword: Foreign Investment, Domestic Investment, Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah antara lain untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Berau. Data yang digunakan adalah data sekunder periode tahun 2010-2018 berupa data PMA, dan PMDN yang diperoleh dari DPMPTSP Propinsi Kalimantan Timur, dan Pengeluaran Pemerintah yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Berau serta data PDRB ADHB yang diperoleh dari BPS Kabupaten Berau. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan investasi yang terdiri dari PMA, dan PMDN, serta Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara

signifikan terhadap PDRB. Sedangkan secara parsial PMA dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB, PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

**Kata Kunci:** Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Selama kurun waktu 2010-2018 Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun 2015 namun berada pada titik terendah pada tahun 2016 dengan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2010-2014 tidak terlepas dari peningkatan produksi batubara PT Berau Coal, sedangkan pertumbuhan yang turun sampai titik negatif terjadi karena adanya penurunan harga batubara dunia sehingga mempengaruhi produksi batubara di Kabupaten Berau.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Berau mengalami siklus yang fluktuatif. Nilai PMA dari tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami naik turun. PMA pada tahun 2013 meningkat menjadi 31.931,5 ribu

US dolar dari 19.779,6 ribu US dolar pada tahun 2012. Berbanding terbalik dengan nilai PMDN, nilai PMA Kabupaten Berau tahun 2014 justru mengalami kenaikan menjadi 87.050 ribu US dolar atau meningkat sebesar 172,60 persen dibanding tahun 2013.

Realisasi belanja pemerintah pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,652,726,885,618 meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp 1,755,880,788,306 dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar Rp 2,838,999,185,137 belanja Pemerintah Kabupaten Berau mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar Rp 2,061,913,210,397 yang disebabkan adanya defisit anggaran.

Investasi dan perekonomian Kabupaten Berau pada periode studi yang mengalami fluktuasi merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam yang berlimpah dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah adalah 1. Apakah PMA berpengaruh signifikan terhadap PDRB? 2. Apakah PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB? 3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB? 4. Apakah PMA, PMDN dan Pengeluaran

Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB?

$b_2$  = Koefisien regresi variabel  $X_2$

$b_3$  = Koefisien regresi variabel  $X_3$

$\varepsilon$  = Error Term

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Unit Analisis penelitian ini adalah Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah (Belanja Daerah), dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Tahun 2010-2018. Metode pengumpulan Data dengan Runtut Waktu (Time Series) di instansi terkait periode tahun 2010-2018.

### Alat Analisis

Analisis data atau perhitungan statistik dalam penelitian ini didasarkan atas kerangka konsep, rumusan masalah serta hipotesis. Adapun perhitungan statistik yang dipergunakan adalah:

#### a. Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinearitas
2. Autokorelasi
3. Uji Normalitas
4. Uji Heterokedastisitas

#### b. Analisis Regresi Linier Berganda

$$\ln Y = a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

$$Y = \text{PDRB ADHB}$$

$a$  = konstanta

$X_1$  = Penanaman Modal Asing

$X_2$

= Penanaman Modal Dalam Negeri

$X_3$  = Pengeluaran Pemerintah

$b_1$  = Koefisien regresi variabel

$X_1$

#### c. Koefisien Determinasi

#### d. Uji Hipotesis

##### 1. Uji Parsial (Uji t)

##### 2. Uji F (Uji Simultan)

#### Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari  $PDB = C + I + G + (X - M)$ . Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4)

Berikut beberapa teori tentang investasi : a. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung

makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89). b. Teori Harrod-Domar merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan/atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007: 256-257).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi. Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU

itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paketpaket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi didalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia.

Menurut Sukirno (2007:5) bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi: (1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri; (2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan (3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

Menurut Mankiw (2003:51) bahwa investasi mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya berasal dari domestik Investasi dari luar negeri juga dapat mempengaruhi *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Gross National Product* (GNP) dengan cara yang berbeda. Investasi asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dan digunakan di negara-negara kaya. Walaupun investasi ini kembali pada investor asing. Namun investasi ini menaikkan

persediaan modal, yang kemudian menaikkan produktifitas dan gaji.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 2003:35).

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah menggunakan keseimbangan pendapatan nasional  $Y=C+I+G+(X - M)$  dimana  $Y$  menggambarkan pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada persamaan  $C+I+G+(X-M)$  dimana  $G$  merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Artinya adanya penurunan ataupun kenaikan akan mengurangi ataupun meningkatkan pendapatan suatu negara.

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja Barang dan Jasa,
- 3) Belanja Modal

b. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan

- pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
- c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai,
  - 2) Belanja bunga,
  - 3) Belanja subsidi,
  - 4) Belanja hibah,
  - 5) Belanja bantuan sosial,
  - 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Tarigan (2005:18-26) PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara (*intermediate cost*), mencakup komponen faktor pendapatan (upah/gaji, bunga, sewa, tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Todaro & Smith

(2006:17) Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) adalah total *output* akhir barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian dalam wilayah negara, oleh penduduk dan bukan penduduk terlepas dari pengakuan domestik dan asing.

PDRB dinyatakan dengan dua cara yaitu:

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Kenaikan pendapatan disebabkan meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap. Pertumbuhan ekonomi perlulah dihitung dari data PDB/PNB riil & dinyatakan dalam persen.

PDRB ADHK dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain yaitu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sedangkan PDRB ADHB menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB ADHB dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK diperuntukkan untuk melihat

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

**Hubungan antara Investasi dengan PDRB**

Jhingan (1999:291) memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian. Selain itu, menurut Pratiwi (2005:19) bahwa investasi yang mempunyai *multiplier effect* berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui kenaikan pendapatan perkapita penduduk.

**Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB**

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2007:168) maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.

**HASIL PENELITIAN**

**Analisis Deskripsi**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Berau. Deskripsi Data Penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan.

Tabel 7. Deskripsi Data Penelitian

Variabel	Min	Maks	Rata-Rata	Std. Deviasi
PMA (X1) (Miliar Rupiah)	125,740	2.575,23	769,753	862,618
PMDN (X2) (Miliar Rupiah)	270,655	6.693,99	2.289,65	1.928,44
Pengeluaran Pemerintah (Y1) (Miliar Rupiah)	1.332,30	2.838,99	1.855,53	440,066
PDRB (Y2) (Miliar Rupiah)	14.558,9	37.638,3	27.963,7	6.753,27
	24	16	89	0

Sumber: Data diolah

**Estimasi Data**

Untuk menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*) pada suatu model maka semua asumsi klasik harus terpenuhi. Pengujian asumsi klasik meliputi uji asumsi multikolinieritas, normalitas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut adalah hasil pengujian asumsi klasik untuk model yang telah dibangun berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

### 1. Asumsi Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji Multikolinieritas

	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
PMA	0,884	1,131
PMDN	0,864	1,158
PP	0,860	1,163

Sumber: hasil SPSS

Dapat dilihat bahwa seluruh variabel pada model memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

### 2. Asumsi Autokorelasi

Pengujian asumsi autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui keterhubungan antara observasi residual. Pengujian asumsi autokorelasi diharapkan observasi residual tidak saling berkorelasi. Hasil pengujian autokorelasi ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Autokorelasi

	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Model	0,774	0,638	0,176	1,392

Sumber: hasil SPSS

Langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  pada tabel Durbin-Watson dengan cara menggunakan derajat kepercayaan 5%, sampel ( $n$ ) yang kita miliki sebanyak 9 observasi, dan variabel penjelas sebanyak 3. Nilai  $d_L$  sebesar 0,4548 dan  $d_U$  sebesar 2,1282. Setelah dimasukkan kedalam skala pengujian, maka diperoleh kesimpulan bahwa model berada pada posisi  $d_L < d < d_U$  atau  $0,4548 < 1,392 < 2,1282$ ; sehingga tidak dapat disimpulkan ada autokorelasi atau tidak.

### 3. Asumsi Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui *normality test* dengan Kolmogorov-Smirnov.

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,936 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada model ini adalah terdistribusi normal.

#### 4. Asumsi Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji korelasi Spearman's rho.

Kriteria pengujian menyatakan apabila signifikansi yang dihasilkan dari pengujian korelasi Spearman's rho > level of significant ( $\alpha=10\%$ ) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui uji korelasi Spearman's rho.

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,10. Karena signifikansi lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### Analisis Data

##### 1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Berau Periode 2010-2018. Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat dibuat dalam bentuk persamaan regresi berikut ini:

$$\ln PDRB = 12,570 + 0,031 \ln PMA + 0,231 \ln PMDN + 0,391 \ln PP$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 12,570 menunjukkan bahwa dalam keadaan variabel PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah bernilai nol, maka  $\ln PDRB$  akan bernilai 12,570
- Koefisien regresi PMA bertanda positif dengan koefisien sebesar 0,031 menunjukkan bahwa variabel PMA berpengaruh positif dan searah terhadap PDRB. Apabila PMA berubah 1 persen, maka PDRB akan berubah sebesar 0,031 sesuai dengan tanda.
- Koefisien regresi PMDN bertanda positif dengan koefisien sebesar 0,231 menunjukkan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif dan searah terhadap PDRB. Apabila PMDN berubah 1 persen, maka PDRB akan berubah sebesar 0,231 sesuai dengan tanda.
- Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah bertanda positif dengan koefisien sebesar 0,391 menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan searah terhadap PDRB. Apabila Pengeluaran Pemerintah berubah 1 persen, maka PDRB akan berubah sebesar 0,391

sesuai dengan tanda.

## 2. Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi pengaruh PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan terhadap PDRB dapat diketahui melalui koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Berikut adalah hasil kontribusi pengaruh melalui koefisien determinasinya ( $R^2$ ):

Tabel 13. Koefisien Determinasi

R	R Square	R Square Adjusted	Std. Error of the Estimate
0,879	0,773	0,637	0,176

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa hasil koefisien determinasi sebesar 0,773 yang menunjukkan bahwa variabel PDRB dipengaruhi oleh variabel PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah sebesar 77,3% sedangkan 22,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, yaitu: konsumsi serta ekspor dan impor.

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji t / Uji Parsial

Uji t statistik merupakan pengujian secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk membuktikan bahwa koefisien regresi ini secara statistik berpengaruh signifikan. Hasil analisis Uji t dengan menggunakan program SPSS

dapat dilihat di tabel berikut.

### 1) PMA Terhadap PDRB

Berdasarkan tabel 12 diperoleh hasil estimasi pengaruh PMA terhadap PDRB memiliki nilai koefisien 0,031 dengan signifikansi sebesar 0,621 serta nilai t-hitung sebesar 0,526 yang berarti lebih kecil dari nilai t-tabel (2,306). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB..

### 2) PMDN Terhadap PDRB

Berdasarkan tabel 12 diperoleh hasil estimasi pengaruh PMDN terhadap PDRB memiliki nilai koefisien 0,231 dengan signifikansi sebesar 0,022 serta nilai t-hitung sebesar 3,267 yang berarti lebih besar dari nilai t-tabel (2,306). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

### 3) Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB

Berdasarkan tabel 12 diperoleh hasil estimasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB memiliki nilai koefisien 0,391 dengan signifikansi sebesar 0,231 serta nilai t-hitung sebesar 1,362 yang berarti lebih kecil dari nilai t-tabel (2,306). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

### b. Uji F / Uji Simultan

Uji F statistik berguna untuk pengujian secara serentak

(simultan) apakah secara keseluruhan koefisien regresi tersebut signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat (dependen variabel). Hasil analisis Uji F statistik dengan menggunakan program SPSS. diperoleh hasil estimasi nilai F-hitung sebesar 5,686 yang berarti lebih besar dari nilai F-tabel (4,066). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh PDRB. Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka keputusannya adalah positif dan signifikan terhadap menerima H4 yang artinya secara statistik PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

**PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan analisis dan pengujian hipotesis pada model berikut ini disajikan interpretasi terhadap hasil analisis yang telah diperoleh sebelumnya.

**1. Pengaruh PMA terhadap PDRB**

Berdasarkan pada analisis yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan dari variabel PMA terhadap PDRB. Pengaruh positif dan tidak signifikan pada struktur model tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PMA yang positif dalam peningkatan produksi serta ukuran pasar domestik berlangsung dengan kurang baik. PMA terutama

melalui sektor perkebunan dinilai kurang mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB. Pada kenyataannya potensi perkebunan yang besar tidak dimanfaatkan oleh investor asing untuk meningkatkan produksinya sehingga memberikan pengaruh yang tidak signifikan.

**2. Pengaruh PMDN terhadap PDRB**

Berdasarkan pada analisis yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel PMDN terhadap PDRB. Pengaruh positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PMDN banyak mempengaruhi peningkatan PDRB yang berlangsung dengan baik. PMDN terutama melalui sektor pertambangan dinilai sangat baik memberikan kontribusi terhadap

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,531	3	0,177	5,686	,046
Residual	0,156	5	0,031		
Total	0,686	8			

PDRB. Potensi pertambangan yang besar sudah dimanfaatkan oleh investor dalam negeri untuk meningkatkan produksinya sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

**3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB**

Berdasarkan pada analisis yang sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan dari variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB. Pengaruh positif dan tidak signifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah yang positif dalam peningkatan produksi serta ukuran pasar domestik berlangsung dengan kurang baik. Pengeluaran Pemerintah terutama melalui belanja modalnya dinilai kurang tepat sasaran sehingga tidak mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB. Pengaruh yang positif tersebut pada kenyataannya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah secara maksimal karena masih tingginya sisa anggaran dalam APBD pada setiap akhir tahun anggaran sehingga pengaruhnya menjadi tidak signifikan.

## **KESIMPULAN**

Setelah memberikan interpretasi terhadap nilai-nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dan analisis data, maka diperoleh beberapa hal yang bisa menggambarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Berau terkait variabel-variabel yang diteliti. Hal tersebut merupakan interpretasi dari nilai-nilai yang diperoleh sebagaimana model yang telah diajukan.

Sesuai model yang diajukan, secara simultan investasi mempengaruhi PDRB ADHK secara positif dan signifikan. Tetapi jika dilihat secara parsial dari variabel pembentuknya, maka hanya PMDN

yang memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan PMA dan Pengeluaran Pemerintah memberikan pengaruh yang tidak signifikan.

PMDN memberikan sumbangan yang sangat besar untuk variabel investasi dengan nilai yang relatif stabil dan dipergunakan pada sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pembentukan PDRB yaitu sektor pertambangan, sedangkan PMA memberikan kontribusi yang kecil karena sektor yang menggunakannya adalah sektor perkebunan yang memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan. Dengan lahan yang luas tetapi investasi yang ditanamkan jauh lebih kecil maka pengaruh yang diberikannya terhadap PDRB akan menjadi lebih kecil. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah sangat kurang alokasinya terhadap sektor-sektor yang mendukung produksi sehingga sehingga tidak mampu menaikkan nilai PDRB secara signifikan terlebih lagi alokasi belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur pada variabel Pengeluaran Pemerintah masih kurang.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Berau sebaiknya lebih cermat dalam menyusun program-program pada APBD yang diharapkan lebih mengarah kepada program yang dapat meningkatkan sektor produksi agar pertumbuhan ekonomi naik

dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Program yang tersusun tersebut hendaknya segera direalisasikan agar sisa lebih pembiayaan anggaran kecil sehingga pengeluaran pemerintah bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan menggunakan model struktural dengan menambahkan variabel baik bebas maupun mediasi agar model yang terbangun lebih mendekati realita sehingga hasilnya menjadi lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2003. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Terjemahan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pratiwi. 2005. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Ketiga. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta
- UU No 11 Tahun 1970 *Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*